

RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM KEKURANGAN STOK OBAT



batampos.co.id

Stok obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)¹ Embung Fatimah kembali kosong. Masyarakat Kota Batam banyak mengeluh karena tidak adanya obat yang mereka butuhkan.

Rencananya Komisi² IV DPRD³ Kota Batam kembali akan memanggil Direktur RSUD Embung Fatimah. "Kita akan memanggil direktornya. Semalam peralatan medis RSUD banyak yang rusak dan tidak layak dipakai, sekarang obat-obatan," tutur Ketua Komisi IV, Djoko Mulyono saat diwawancarai Tribun, Selasa (16/1/2018).

Ia juga menghimbau agar kondisi ini jangan sampai berkesinambungan. Apalagi penyediaan obat sudah dianggarkan⁴ tinggi untuk 2018. Selain itu, kekosongan obat ini akan mempengaruhi kualitas dan pelayanan di rumah sakit tersebut. "Anggaran untuk

¹ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota adalah unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan yang merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bersifat otonom, serta dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah)

² Komisi adalah Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota (Pasal 375 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

³ DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014)

⁴ Anggaran atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

2018 ini meningkat dari tahun sebelumnya. Namun kenyataannya bulan ini masih kosong," ujarnya kesal.

Sementara itu kekosongan obat di RSUD tersebut bukan kali pertama. Padahal beberapa waktu lalu sudah pernah sidak, harusnya mereka memperbaiki hasil sidak tersebut. Namun kenyataannya masih terjadi kekosongan obat tersebut. "Kemarin sudah pergantian direktur, kami pernah undang namun beliau tidak menghadiri undangan kami. Rencananya kami ingin mempertanyakan kelangkaan obat yang kerap sering terjadi di Rumah Sakit plat merah itu," ujarnya Djoko.

Sama halnya dengan anggota komisi IV DPRD Batam, Safari Ramadhan juga menyesalkan hal ini. Baginya bukan hanya kekosongan obat saja yang sering terjadi. Pelayanan dan peralatan juga sering mengecewakan masyarakat. "Semoga pejabat-pejabat yang baru dilantik ini bisa menyelesaikan persolan yang terjadi di RSUD ini. Padahal urusan kesehatan bukan urusan yang abal-abal melainkan urusan yang utama," tutur Safari mengakhiri percakapan tersebut.

Kekosongan stok obat yang sering terjadi di RSUD Embung Fatimah disebabkan oleh tunggakan utang RSUD yang belum dibayarkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur RSUD Embung Fatimah drg. Ani Dewiyana dalam pertemuan bersama dengan Komisi IV di gedung DPRD Kota Batam.

"Utang masih ada sama *vendor* tersebut. Karena itu *vendor* itu tidak mau menyuplai obat-obatannya ke kita. Itulah sebabnya stok beberapa obat kosong," ujarnya kepada Tribunbatam.id se usai pertemuan tersebut, Jum'at (19/1/2018).

Berdasarkan hasil inventarisir, jumlah utang RSUD secara keseluruhan mencapai Rp21,9 miliar. Utang ini sudah menumpuk seiring tidak dibayarkan obat-obatan ke sejumlah *supplier* yang bekerja sama dengan RSUD. Utang ini sudah termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁵ Perwakilan Provinsi Kepri.

Ani mengatakan, pihaknya bisa saja membayar utang ini kepada *supplier* obat, hanya saja harus menunggu hasil audit⁶ oleh BPK. Sehingga bisa dipastikan kekosongan

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

⁶ Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

obat-obatan ini akan terus terjadi. "Total utang untuk obat saja kisaran Rp7,6 miliar," ujarnya.

Ani mengaku sudah berusaha dengan beberapa cara. Misalnya obat yang mudah didapatkan akan disuplai dari *vendor* yang lain. "Ada beberapa obat kosong sudah kita upayakan. Karena memang disini sudah tidak ada yang mau lagi mensuplai obat," ujarnya.

Ani mengakui banyak sekali permasalahan di RSUD. Mulai dari klaim BPJS, obat kosong, alat-alat kesehatan rusak dan sebagainya. Namun begitu, ia tetap optimistis bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Bukan hanya itu, ia juga mengakui, dari hasil inventarisir sedikitnya ada sekitar Rp1,5 miliar sisa klaim BPJS yang hilang. Hanya saja yang jadi permasalahan saat ini, klaim terhadap BPJS bisa dilakukan jika masih di dua tahun terakhir. "Ya, hanya dua tahun terakhir saja yang bisa. Tunggakan tahun 2014 dan 2015 sudah tak bisa diklaim lagi," ujarnya.

Bantuan Obat Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Ani Dewiyana mengungkapkan bantuan obat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan disalurkan pekan ini. "Sudah dibantu, saya minta dalam minggu ini (obatnya disalurkan)," ungkap Ani usai rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi serta bersama Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad di Kantor Walikota Batam, Senin (22/1) sore.

Walau tak bisa merinci berapa banyak obat yang akan dibantu Pemprov Kepri, dia mengklaim bantuan tersebut mencakup obat yang selama ini kosong seperti obat untuk penyakit asma, hipertensi, gula darah hingga obat maagh. "Sebagian kan ada, (yang dibantu) semua yang tidak ada sama kami. Itemnya banyak sekali," ucapnya.

Dia mengaku penyediaan obat merupakan kewajiban rumah sakit, tanpa harus dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien untuk mencari di luar rumah sakit. Untuk itu pihaknya kini tengah mengusahakan semaksimal mungkin agar hal tersebut tidak terus

negara (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara)

terjadi. "Iya betul (rumah sakit sediakan). Makanya kami sedang usaha (sediakan obat)," katanya.

Dalam hal ini, ia mengklaim uang untuk pengadaan obat tersedia. Namun dalam proses pengadaan⁷ perlu melewati mekanisme yang telah ditentukan. "Ini uang negara⁸ harus sesuai aturan. Tak bisa beli suka-suka macam duit saya kalau saya nak beli," imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan utang RSUD Embung Fatimah pada *vendor* penyedia obat sebesar Rp7,9 miliar. Utang inilah yang disebut-sebut menjadi cikal bakal kosongnya obat di rumah sakit plat merah tersebut, bagaimana tidak para *vendor* memutuskan untuk menghentikan suplai obat. "Yang utang saya tak hafal rinciannya tahun berapa saja. Bisa ditanyakan ke bagian keuangan kami," pungkas Ani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan turun langsung untuk menyelesaikan persolan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam. Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun mengatakan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri akan melakukan survei terhadap kebutuhan obat di RSUD Embung Fatimah. "Akan kita bantu terhadap masalah yang ada di RSUD Embung Fatimah. Ini sudah memang tugas kita," kata Nurdin ditemui usai menghadiri peringatan bulan K3 Nasional 2018 di Hotel Harmoni One, Sabtu (20/1/2018).

Nurdin menyebutkan untuk kebutuhan obat yang mendesak akan segera dikirim secepatnya agar pelayanan di RSUD Embung Fatimah tetap bisa berjalan maksimal. Sementara untuk kelengkapan obat penunjang yang masih kosong akan menyesuaikan dengan hasil survei nantinya. "Jika stok ada, kita akan langsung bantu. Nanti tergantung hasil surveinya nanti," katanya.

Dalam prosesnya nanti, Nurdin mengingatkan harus ada kerja sama yang baik. Pihak RSUD Embung Fatimah harus mendukung upaya perbaikan ini dengan memberikan laporan yang benar-benar diperlukan. Nurdin tegaskan tetap akan turun

⁷ Lelang atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

⁸ Uang Negara/Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)

tangan karena memang sudah menjadi tugasnya membantu kebutuhan daerah. Apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan buat masyarakat. “Saya sudah katakan, walaupun tidak diminta, harus ikut selesaikan persoalan yang ada” katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)⁹ bersama Komisi IV DPRD Kota Batam, Jumat (19/1/2018), Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dwiyana mengaku akan berupaya memaksimalkan waktu yang tersisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ani yang baru dua minggu menjabat sebagai Direktur rumah sakit ini telah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan ragam masalah yang terjadi di rumah sakit ini.

“Bukan hanya obat-obatan saja, banyaknya peralatan-peralatan medis yang rusak, tidak pernah *dimaintenance*, dan banyak lagi. Dengan tim ini kita akan mencoba menyelesaikannya,” katanya dalam RDP tersebut.

Dia mengakui masalah tidak tersedianya stok obat di RSUD Embung Fatimah memasuki fase yang kian memprihatinkan setelah *vendor* obat di Batam tidak lagi mau mensuplai obat ke RSUD ini. Sementara desakan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar permasalahan yang masuk dalam catatan BPK harus segera tuntas dalam dua bulan. Hasil audit BPK sendiri dikeluarkan pada Selasa (19/12/2017) lalu, artinya RSUD tinggal memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan rekomendasi¹⁰ yang dikeluarkan BPK.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah mendapat bantuan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bantuan obat tersebut langsung diberikan oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin. Sebelumnya, Walikota Batam HM Rudi meminta bantuan obat-obatan untuk RSUD karena banyak stok kosong

Nurdin mengatakan bahwa obat merupakan hal yang penting sehingga pihaknya segera mengirimkannya. “Ini terkait pelayanan, makanya kita berikan secepat mungkin,” ujar Nurdin di RSUD Embung Fatimah, Rabu (24/1/2018).

⁹ Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara DPRD dan pemerintah daerah (Pasal 65 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

¹⁰ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Sebanyak 26 koli dengan 8 jenis obat diberikan kepada RSUD Embung Fatimah. Dan bantuan obat-obatan tersebut masih dalam tahap pertama. “Nanti akan kita berikan lagi, kejadian ini juga bukan pertama kali kita alami, di Lingga dan Anambas juga pernah demikian,” katanya.

Stok obat banyak kosong diketahui karena pihak RSUD belum membayarkan utang kepada *vendor* yang biasanya menyuplai obat ke RSUD. Direktur RSUD Embung Fatimah, dr Ani Dewiyana menambahkan, selain mendapat bantuan obat dari Pemprov, pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan Kimia Farma. “Saat ini obat yang diberikan Pemprov sudah dapat memenuhi kebutuhan kita, awal bulan Februari nanti akan ada bantuan berikutnya dari Pemprov, obat-obat ini merupakan stok yang ada di Pemprov,” ujar Ani.

Sumber Berita:

batam.tribunnews.com, Heboh! Benarkah Stok Obat-obatan di RSUD Embung Fatimah Habis? Ini Reaksi DPRD Batam!, Selasa, 16 Januari 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/01/16/heboh-benarkah-stok-obat-obatan-di-rsud-embung-fatimah-habis-ini-reaksi-dprd-batam>

batam.tribunnews.com, HADEH! Akibat Utang RSUD Embung Fatimah Menumpuk, Stok Obat Banyak, Jumat, 19 Januari 2018

<http://batam.tribunnews.com/2018/01/19/hadeh-akibat-utang-rsud-embung-fatimah-menumpuk-stok-obat-banyak-kosong?>

centralbatam.co.id, Nurdin Siap Selesaikan Kekurangan Obat di RSUD Embung Fatimah, Sabtu, 20 Januari 2018

<https://centralbatam.co.id/nurdin-siap-selesaikan-kekurangan-obat-rsud-embung-fatimah/>

www.jpnn.com, Parah, RSUD Embung Fatimah Masih Krisis Obat, Selasa, 23 Januari 2018

<https://www.jpnn.com/news/parah-rsud-embung-fatimah-masih-krisis-obat?>

batamnews.co.id, Nurdin Serahkan Langsung Bantuan Obat-obatan untuk RSUD Embung Fatimah, Rabu 24 Januari 2018

<http://batamnews.co.id/berita-29054-nurdin-serahkan-langsung-bantuan-obatobatan-untuk-rsud-embung-fatimah--.html>

Catatan: